



JURNAL AKUNTANSI
Volume 20 Nomor 2 Juni - November 2025 30 - 47
<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak>
ISSN: 1907-9958 (Print) | 2385-9246 (Online)

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020-2024

Febri Ardi Nugroho^{a,*}, Romandhon^b, Susanti^c

^a Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

^b Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

^c Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo, Indonesia

febri.ardi76@gmail.com

Diterima: Oktober 2025. **Disetujui:** Oktober 2025. **Dipublikasi:** November 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the financial capability of Wonosobo Regency in supporting the implementation of regional autonomy during the period of 2020–2024. The research employs a descriptive qualitative approach using primary data obtained through interviews and secondary data derived from Budget Realization Reports and publications of the Central Bureau of Statistics (BPS). The analysis involves calculations of the independence ratio, fiscal decentralization ratio, local revenue effectiveness, financial dependency, as well as share, growth, and elasticity analysis. The findings indicate that the level of financial independence in Wonosobo Regency remains in the low category with an instructive relationship pattern, meaning that the regional government is still highly dependent on transfer revenues. Although the effectiveness of local revenue (PAD) is categorized as very effective, its contribution to the total regional income remains low, and its growth fluctuates. Quadrant analysis shows that regional financial conditions are unstable, with potential improvement occurring only in certain years. The main constraints include suboptimal utilization of PAD potential, the dominance of operational expenditures, and challenges in implementing digital-based revenue collection. The government has undertaken efforts through intensification, extensification, and administrative modernization, but the results have not yet shown significant improvement. Therefore, a sustainable strategy is required to strengthen the revenue base and regional fiscal capacity.

Keywords: Regional Financial Independence; Regional Autonomy; Fiscal Decentralization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Wonosobo dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah selama tahun 2020–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara serta data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran dan publikasi BPS. Analisis dilakukan melalui perhitungan rasio kemandirian, desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan, serta analisis share, growth, dan elasticity. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Wonosobo masih berada pada kategori rendah dengan pola hubungan instruktif, yang berarti pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan transfer. Meskipun efektivitas PAD berada dalam kategori sangat efektif, kontribusi PAD terhadap total

pendapatan daerah masih rendah dan pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif. Analisis kuadran menunjukkan kondisi keuangan daerah tidak stabil, hanya pada tahun tertentu menunjukkan potensi peningkatan. Kendala utama meliputi terbatasnya optimalisasi potensi PAD, dominasi belanja operasional, serta hambatan dalam penerapan digitalisasi pemungutan. Upaya pemerintah telah dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan modernisasi administrasi, namun hasilnya belum signifikan. Diperlukan strategi berkelanjutan untuk memperkuat basis pendapatan dan ruang fiskal daerah.

Kata Kunci: Kemandirian Keuangan Daerah; Otonomi Daerah; Desentralisasi Fiskal.

PENDAHULUAN

Sejak era reformasi, Indonesia mulai menerapkan sistem otonomi daerah secara luas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan kewenangan fiskal dan administratif yang diberikan pemerintah pusat kepada provinsi serta kabupaten/kota untuk mempercepat pelayanan publik, meningkatkan akuntabilitas, dan mendorong pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah (Natsir, 2025). Keberhasilan otonomi daerah pada dasarnya tergantung pada kemampuan tiap daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri, terutama melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencerminkan kapasitas fiskal lokal dalam mencapai kemandirian dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara teori (Wahyudi et al., 2022), pembagian fiskal ini sejalan dengan konsep fiskal federalism, yang menekankan pentingnya desentralisasi fiskal supaya layanan publik bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat tiap daerah, terciptanya kompetisi antar daerah, serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan. Namun, konsep ini juga menekankan adanya risiko jika kapasitas penerimaan daerah masih terbatas.

Dalam praktiknya, meskipun otonomi daerah Indonesia dimaksudkan untuk memperkuat kewenangan pemerintah daerah, kenyataannya banyak daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

konsolidasi menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah bervariasi dan dalam banyak kasus masih relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pada pemerintah pusat, yang pada akhirnya membatasi kemandirian daerah dalam menyusun kebijakan fiskal. Ketergantungan ini juga mengurangi kapasitas investasi publik jangka panjang, mempersempit ruang gerak kebijakan lokal, dan berpotensi memperlebar kesenjangan antar daerah dalam menyediakan layanan dasar (Saragih & Nurlinda, 2023).

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer Kabupaten/Kota se-Karesidenan Kedu Tahun 2024

Kab/Kota	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)
Kab Kebumen	484.291.013.938	2.634.840.256.696
Kab Temanggung	388.858.102.726	1.710.621.753.062
Kab Purworejo	448.851.158.304	1.958.558.013.367
Kab Wonosobo	307.369.375.961	1.787.558.656.978
Kab Magelang	520.847.740.395	2.249.187.553.796
Kota Magelang	348.971.932.087	663.233.203.738

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024

Tabel 1 menyajikan perbandingan sumber pendapatan di kabupaten dan kota se-Karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut terlihat bahwa kabupaten/kota di Karesidenan Kedu Provinsi Jawa Tengah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara kontribusi PAD masih relatif kecil.

Dari seluruh daerah di atas, Kabupaten Wonosobo memiliki Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang paling rendah.

Artinya, meskipun daerah lain juga masih bergantung pada pendapatan transfer, tingkat ketergantungan Kabupaten Wonosobo jauh lebih besar. Sebaliknya, sejumlah daerah lain di Karesidenan Kedu berhasil menempatkan PAD dengan rasio yang lebih besar. Walaupun daerah tersebut tetap mengandalkan pendapatan transfer, ruang fiskal yang dimiliki lebih kuat karena ada sumber PAD yang dapat diandalkan.

Dengan memperhatikan fenomena dan permasalahan yang terjadi di daerah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memeriksa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Wonosobo serta pertumbuhan ekonominya selama periode Tahun Anggaran 2020-2024. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang menghambat pencapaian kemandirian fiskal, serta mengkaji sejauh mana strategi dan upaya yang telah atau dapat ditempuh oleh pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sejalan dengan itu, penelitian ini secara spesifik diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo selama Tahun Anggaran 2020-2024?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah jika ditinjau dari kinerja keuangan daerah?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala terhadap peningkatan kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi daerah?
4. Upaya apa yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo untuk mengatasi kendala-kendala tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah serta pertumbuhan ekonomi

Pemerintah Kabupaten Wonosobo selama periode 2020-2024 (Waruwu et al., 2025). Objek penelitian difokuskan pada dua aspek utama, yaitu kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan rentang waktu analisis mencakup tahun 2020 hingga 2024.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Wonosobo guna memperoleh informasi langsung terkait pengelolaan keuangan daerah. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2020–2024 yang dikeluarkan oleh BPPKAD Kabupaten Wonosobo serta BPS Kabupaten Wonosobo Dalam Angka.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis rasio kemandirian keuangan daerah serta analisis pertumbuhan ekonomi daerah melalui pendekatan *share*, *growth*, dan *elasticity* (Azwar, 2023). Kedua metode tersebut digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal daerah sekaligus menggambarkan pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo selama periode penelitian.

Tabel 2. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No.	Rasio	Rumus
Kemandirian Keuangan Daerah		
1.	Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah}} \times 100\%$
2.	Desentralisasi Fiskal	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
3.	Efektivitas PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$
4.	Ketergantungan Keuangan Daerah	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

1. <i>Share</i>	$\frac{\text{PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	$\frac{x}{100\%}$
2. <i>Growth</i>	$\frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}}$	$\frac{x}{100\%}$
3. <i>Elasticity</i>	$\frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}$	$\frac{x}{100\%}$

Sumber: Data yang diolah (2025)

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan PAD. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, maka semakin besar tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan kata lain, daerah semakin mampu mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal, khususnya transfer dari pemerintah pusat (Rahayu et al., 2024).

Tingkat kemandirian keuangan daerah dapat dilihat melalui klasifikasi interval rasio kemandirian, yang disajikan dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
0 – 25	Rendah Sekali	Instruktif
>25 – 50	Rendah	Konsultatif
>50 – 75	Sedang	Partisipatif
>75 – 100	Tinggi	Delegatif

Sumber: Data yang diolah (2025)

2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah mampu memanfaatkan PAD untuk membiayai belanja daerah. Semakin tinggi nilai rasio DDF, semakin besar tingkat kemandirian fiskal daerah, yang berarti daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam

mendanai kebutuhan belanjanya tanpa bergantung pada sumber pendanaan eksternal (Fadhilla et al., 2025).

Tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio desentralisasi fiskal dapat dikategorikan ke dalam beberapa persentase klasifikasi. Klasifikasi tersebut disajikan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Klasifikasi Kriteria Rasio Desentralifikasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Data yang diolah (2025)

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kemampuan daerah dalam mencapai target penerimaan PAD. Dengan kata lain, rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perencanaan pendapatan daerah dilakukan secara realistis dan diikuti dengan pelaksanaan pemungutan yang efektif (Faradilla & Hanifa, 2024). Tingkat efektivitas PAD dapat dikategorikan berdasarkan klasifikasi persentase tertentu. Kriteria tersebut disajikan dalam Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Klasifikasi Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber: Data yang diolah (2025)

4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin besar pula ketergantungan daerah pada pendapatan transfer untuk membiayai kebutuhan fiskalnya. Sebaliknya, nilai rasio yang lebih rendah menunjukkan bahwa daerah lebih mampu memenuhi kebutuhan belanjanya melalui pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri (Abdullah & Hasan, 2022).

Tingkat kemampuan keuangan daerah berdasarkan rasio ketergantungan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa klasifikasi persentase tertentu. Klasifikasi tersebut disajikan dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Klasifikasi Kriteria Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Kriteria
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Data yang diolah (2025)

5. Analisis *Share*

Penilaian terhadap tinggi atau rendahnya nilai *share* dilakukan dengan membandingkannya terhadap nilai rata-rata. Nilai *share* yang tinggi mencerminkan besarnya kontribusi PAD terhadap total belanja daerah, yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih kuat. Sebaliknya, nilai *share* yang rendah mengindikasikan ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendapatan lain, seperti transfer dari pemerintah pusat atau bantuan antar daerah (Naning Setiani & Aris Eddy Sarwono, 2025).

6. Analisis *Growth*

Penentuan tinggi atau rendahnya nilai *growth* dilakukan dengan membandingkan hasilnya terhadap nilai rata-rata. Jika nilai *growth* pada tahun tersebut berada di atas rata-rata, maka dikategorikan tinggi. Sebaliknya, jika nilai *growth* pada tahun tersebut berada di bawah rata-rata, maka dikategorikan rendah. Selain itu, apabila nilai *growth* menunjukkan angka positif secara konsisten setiap tahun, hal ini menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan dan mempertahankan PAD, sehingga mencerminkan potensi pertumbuhan ekonomi yang baik (Amaliyah, 2020).

7. Klasifikasi Kuadran

Klasifikasi kuadran ini digunakan untuk menganalisis kondisi keuangan daerah dengan memperhatikan dua indikator utama, yaitu *share* (kontribusi PAD terhadap total pendapatan) dan *growth* (tingkat pertumbuhan PAD) (Suryahadi & Santosa, 2024). Berdasarkan kombinasi kedua indikator ini, kondisi keuangan daerah dibagi ke dalam empat kuadran, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:

<i>Growth</i>	
Kuadran II	Kuadran I
<i>Share</i> Rendah, <i>Growth</i> Tinggi	<i>Share</i> Tinggi, <i>Growth</i> Tinggi
Kuadran IV	Kuadran III
<i>Share</i> Rendah, <i>Growth</i> Rendah	<i>Share</i> Tinggi, <i>Growth</i> Rendah

Sumber: Data Primer yang diolah (2025)

Gambar 1. Kuadran Kombinasi *Share* dan *Growth*

a. Kuadran I (Mandiri dan Potensial)

Daerah yang masuk ke Kuadran I memiliki nilai *share* dan *growth* yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu membiayai belanja daerahnya secara mandiri melalui PAD sekaligus memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan kata lain, kondisi ini mencerminkan situasi paling optimal dalam hal kemandirian fiskal dan kapasitas pengembangan ekonomi lokal.

b. Kuadran II (Tidak Mandiri tapi Potensial)

Daerah yang termasuk dalam Kuadran II memiliki nilai *share* yang rendah tetapi *growth* yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun daerah masih tergantung pada sumber pendapatan lain, potensi pertumbuhan PAD-nya cukup baik. Dengan pengelolaan yang optimal, daerah-daerah dalam kuadran ini memiliki peluang untuk meningkatkan kemandirian fiskal di masa mendatang.

c. Kuadran III (Mandiri tapi Tidak Potensial)

Daerah yang tergolong dalam Kuadran III memiliki nilai *share* yang tinggi tetapi *growth* yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun

daerah sudah mampu membiayai belanjanya sendiri melalui PAD, kapasitasnya untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi pertumbuhan pendapatan di masa depan terbatas. Dengan kata lain, kemandirian fiskal sudah tercapai, tetapi prospek pertumbuhan ekonomi relatif stagnan.

d. Kuadran IV (Tidak Mandiri dan Tidak Potensial)

Daerah yang termasuk dalam Kuadran IV memiliki nilai *share* dan *growth* yang rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak mandiri secara fiskal sekaligus memiliki prospek pengembangan PAD yang terbatas. Dengan kata lain, daerah berada pada posisi terlemah secara keuangan dan membutuhkan intervensi strategis untuk mendorong pembangunan fiskal dan meningkatkan kemandirian ekonomi di masa depan.

8. Analisis *Elasticity*

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PAD bersifat elastis terhadap pertumbuhan PDRB. Dengan kata lain, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan terjadi peningkatan pada PAD. Kriteria penilaian berdasarkan persentase hasil perhitungan rasio dijelaskan sebagai berikut:

1. Elastis, terjadi apabila hasil perhitungan lebih besar dari 1 (>1). Hal ini menunjukkan bahwa perubahan PDRB memiliki dampak yang signifikan terhadap PAD; misalnya, setiap kenaikan 1% pada PDRB akan mengakibatkan peningkatan PAD lebih dari 1%.
2. Elastis Uniter, terjadi apabila hasil perhitungan sama dengan 1 ($=1$). Artinya, perubahan PDRB sebanding dengan perubahan PAD; setiap kenaikan 1% pada PDRB akan diikuti oleh kenaikan 1% pada PAD.

3. Inelastis, terjadi apabila hasil perhitungan kurang dari 1 (<1). Kondisi ini menandakan bahwa perubahan PDRB tidak terlalu berdampak pada PAD, sehingga kenaikan 1% pada PDRB hanya menyebabkan peningkatan PAD kurang dari 1% (Rasid & Waluyo, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

1. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan
- Rasio Kemandirian Keuangan Daerah digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Melalui perhitungan rasio ini, dapat diketahui sejauh mana Kabupaten Wonosobo mampu memenuhi kebutuhan belanja publik dan pembangunan daerahnya dengan mengandalkan sumber pendapatan internal yang dimiliki.

Penelitian (Harto & Junawan, 2025) pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah mengarah pada penguatan kapasitas fiskal dalam menekan ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian tersebut tercermin dari peran Pendapatan Asli Daerah yang semakin dominan dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan, sehingga hubungan keuangan yang terbangun cenderung bersifat delegatif. Temuan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah relatif telah mampu memaksimalkan potensi ekonomi lokal sebagai sumber

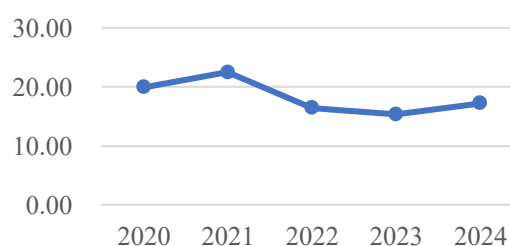
pembiayaan utama, meskipun kinerjanya masih dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal.

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Kemandirian (%)	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
2020	19,95	Rendah Sekali	Instruktif
2021	22,50	Rendah Sekali	Instruktif
2022	16,42	Rendah Sekali	Instruktif
2023	15,34	Rendah Sekali	Instruktif
2024	17,19	Rendah Sekali	Instruktif
Rata-rata	18,28	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio, tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020–2024 memiliki rata-rata sebesar 18,28%, yang menempatkannya pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan transfer dalam membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Gambar 2. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 2, grafik rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan pola yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun sempat

mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2024, secara keseluruhan Kabupaten Wonosobo masih belum mencapai tingkat kemandirian fiskal karena nilai rasio kemandirian masih berada jauh di bawah angka ideal. Menurut data dari BPPKAD Kabupaten Wonosobo, rendahnya tingkat kemandirian tersebut dipengaruhi oleh capaian PAD yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan belanja publik, sehingga belanja operasi menjadi lebih dominan sementara porsi belanja modal relatif rendah.

2. Analisis Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk mengukur sejauh mana PAD berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai rasio, semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal dengan mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Dengan demikian, rasio desentralisasi fiskal menjadi indikator penting untuk melihat kemandirian fiskal dan kapasitas daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan tanpa ketergantungan berlebih pada pendapatan transfer.

Berdasarkan penelitian (Hasanah et al., 2025), analisis terhadap rasio desentralisasi fiskal mengungkapkan bahwa besaran kewenangan fiskal yang didelegasikan kepada pemerintah daerah masih sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola serta memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya menggambarkan kemandirian yang bersifat struktural, mengingat dukungan pemerintah pusat melalui mekanisme transfer masih memegang peranan yang

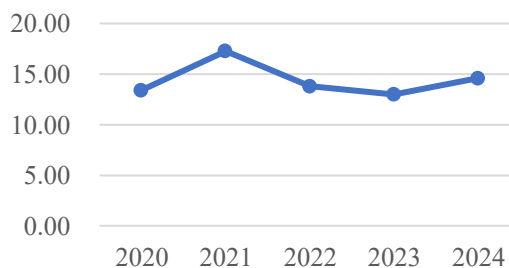
dominan dalam menjaga kapasitas fiskal daerah.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio	
	Desentralisasi Fiskal (%)	Kriteria
2020	13,40	Kurang
2021	17,27	Kurang
2022	13,79	Kurang
2023	12,98	Kurang
2024	14,60	Kurang
Rata-rata	14,41	Kurang

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Berdasarkan hasil perhitungan, rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Wonosobo selama tahun 2020–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Rata-rata nilai rasio yang diperoleh berada pada angka 14,41%, yang termasuk dalam kategori kurang. Nilai rasio tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 17,27%. Sedangkan nilai terendah tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar 12,98%. Kondisi ini mencerminkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah dan belum menunjukkan peningkatan yang stabil dari tahun ke tahun.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Gambar 3. Grafik Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 3, Grafik menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Wonosobo selama periode penelitian mengalami tren yang fluktuatif, dengan peningkatan yang cukup terlihat pada tahun 2021 dan 2024. Kenaikan pada kedua tahun tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya PAD. Sebaliknya, penurunan rasio pada tahun 2022 terjadi karena menurunnya PAD, sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat justru meningkat sehingga komposisi PAD dalam total pendapatan daerah menjadi lebih kecil. Meskipun terdapat dinamika peningkatan pada beberapa tahun, nilai rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Wonosobo masih berada di bawah 20% dan termasuk dalam kriteria kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih belum memadai untuk menopang pelaksanaan desentralisasi fiskal secara optimal, serta mengindikasikan ketergantungan yang masih tinggi terhadap pendapatan transfer.

Keterbatasan dalam pengembangan sektor-sektor potensial, seperti pariwisata dan sektor komersial menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kontribusi PAD. Struktur ekonomi daerah yang belum sepenuhnya mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif membuat pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Di sisi lain, tingginya porsi belanja operasi, khususnya belanja pegawai menyerap sebagian besar anggaran daerah, sehingga ruang fiskal untuk belanja pembangunan dan investasi daerah menjadi terbatas.

3. Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas PAD dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan PAD dan anggaran PAD yang telah ditetapkan sebelumnya.

Semakin besar nilai rasio yang dihasilkan, semakin menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mencapai bahkan melampaui target yang direncanakan, sehingga pengelolaan PAD dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan penelitian (Pardede, 2024) di Pemerintah Kabupaten Kendal, hasil pengukuran rasio efektivitas PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara umum mampu merealisasikan PAD sejalan dengan target yang telah direncanakan. Hal ini mengindikasikan adanya keselarasan antara perencanaan pendapatan dan kemampuan riil dalam pemungutan PAD, sehingga kinerja pengelolaan pendapatan daerah dapat dikategorikan relatif optimal. Namun demikian, adanya variasi tingkat efektivitas antarperiode menandakan bahwa pencapaian tersebut masih dipengaruhi oleh perubahan kebijakan, kondisi perekonomian daerah, serta mutu pengelolaan dan pengawasan terhadap pendapatan daerah.

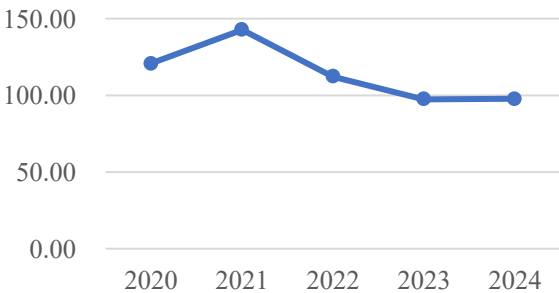
Selama tahun 2020-2024, tingkat efektivitas PAD Kabupaten Wonosobo menunjukkan rata-rata sebesar 114,11% yang berarti berada dalam kategori sangat efektif. Capaian tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan rasio efektivitas mencapai 142,71%, menandakan bahwa realisasi PAD jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Sementara nilai terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 97,35%, yang masih berada dalam kategori cukup efektif karena realisasi PAD hampir memenuhi target yang direncanakan.

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2020	120,64	Sangat Efektif
2021	142,71	Sangat Efektif
2022	112,16	Sangat Efektif
2023	97,35	Cukup Efektif
2024	97,70	Cukup Efektif
Rata-rata	114,11	Sangat Efektif

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Berikutnya pada gambar 4 grafik menunjukkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten Wonosobo mengalami tren penurunan sejak tahun 2022. Penurunan yang cukup signifikan terlihat pada tahun 2023, yaitu sebesar -14,81% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga berada pada kategori cukup efektif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi PAD belum sepenuhnya mampu memenuhi target yang ditetapkan.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Gambar 4. Grafik Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tingginya efektivitas PAD pada tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan target penerimaan secara realistis sesuai kapasitas riil daerah. Penetapan target yang tepat serta

strategi penagihan yang optimal mendorong pencapaian realisasi PAD mendekati bahkan melampaui target. Namun demikian, penyusunan target PAD tetap harus mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kondisi ekonomi agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi. Ketidaktepatan dalam perencanaan dapat berpotensi menimbulkan SiLPA dan mengurangi efisiensi anggaran.

4. Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai rasionya, semakin besar porsi pendanaan daerah yang berasal dari sumber eksternal, sehingga menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya sendiri.

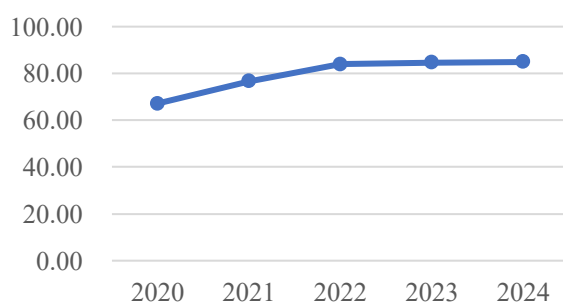
Berdasarkan temuan (Patonah et al., 2023), analisis rasio ketergantungan keuangan daerah mengindikasikan bahwa pemerintah desa masih sangat bergantung pada dana transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah di atasnya, sehingga tingkat kemandirian fiskal desa belum terbentuk secara optimal. Situasi ini menggambarkan keterbatasan desa dalam mengoptimalkan potensi dan pengelolaan sumber pendapatan asli, yang selanjutnya berimplikasi pada ruang gerak serta mutu pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan desa, khususnya dalam menjaga keberlanjutan program dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga ketergantungan fiskal tidak selalu bermakna negatif apabila ditopang oleh tata kelola keuangan yang memadai.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Rasio Ketergantungan (%)	Kriteria
2020	67,17	Sangat Tinggi
2021	76,73	Sangat Tinggi
2022	83,98	Sangat Tinggi
2023	84,63	Sangat Tinggi
2024	84,89	Sangat Tinggi
Rata-rata	79,48	Sangat Tinggi

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Selama tahun 2020–2024, rata-rata rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Wonosobo mencapai 79,48% yang berarti masuk dalam kategori sangat tinggi. Angka ini menunjukkan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, sehingga kemandirian fiskal daerah dalam membiayai aktivitas pemerintahan dan pembangunan masih rendah.



Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Gambar 5. Grafik Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Pada tahun 2024, tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Wonosobo mencapai 84,89% yang merupakan nilai tertinggi selama periode penelitian. Kenaikan rasio dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa porsi

pendanaan daerah yang berasal dari dana transfer semakin dominan. Dengan nilai rasio yang konsisten berada di atas 50% ketergantungan tersebut tergolong sangat tinggi, sehingga menandakan bahwa peran PAD dalam mendukung pembiayaan daerah masih terbatas.

Rendahnya kontribusi PAD menjadi faktor utama yang mendorong tingginya ketergantungan Kabupaten Wonosobo terhadap pendapatan transfer. Sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah dan retribusi masih terbatas, baik dari sisi basis penerimaan maupun kapasitas optimalisasinya. Di sisi lain, porsi belanja operasi, khususnya yang dibiayai melalui Dana Alokasi Umum (DAU) cukup besar, sehingga kebutuhan fiskal daerah banyak disokong oleh pendapatan transfer.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

1. Analisis *Share*

Analisis *share* digunakan untuk mengukur sejauh mana PAD berkontribusi dalam membiayai belanja daerah. Semakin tinggi nilai *share*, semakin besar kemampuan daerah dalam mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri tanpa bergantung secara dominan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, besarnya nilai *share* mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dalam memobilisasi sumber daya keuangan lokal.

Berdasarkan analisis *share* pada penelitian (Syarifudin & Ramadhani, 2023), komposisi pendapatan daerah memperlihatkan bahwa peran PAD dalam menopang total pendapatan masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kontribusi dana transfer, sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah belum sepenuhnya terwujud. Dominasi pajak daerah dan retribusi dalam struktur PAD menunjukkan

adanya peluang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah, namun pemanfaatannya belum cukup signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini menandakan bahwa meskipun pengelolaan keuangan daerah cenderung mengalami perbaikan, peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah tetap memerlukan penguatan basis perpajakan, perluasan cakupan pajak dan retribusi, serta konsistensi kebijakan fiskal guna mendorong kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 11. Hasil Perhitungan Analisis *Share* Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai <i>Share</i> (%)
2020	16,37
2021	18,26
2022	13,17
2023	12,68
2024	14,21
Rata-rata	14,94

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Rata-rata nilai *share* Kabupaten Wonosobo selama periode 2020–2024 tercatat sebesar 14,94%. Pada tahun 2020 dan 2021, nilai *share* berada di atas rata-rata, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut kemampuan daerah dalam membiayai belanja dari PAD relatif lebih baik. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, nilai *share* berada di bawah rata-rata, menandakan rendahnya kontribusi PAD dalam mendukung belanja daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BPPKAD Kabupaten Wonosobo, rendahnya nilai *share* pada tahun 2022–2024 terutama disebabkan oleh belum optimalnya penggalian potensi PAD, sementara

kebutuhan belanja daerah tetap tinggi. Meskipun demikian, pada tahun 2024 mulai terlihat adanya peningkatan nilai *share* walaupun masih berada di bawah rata-rata, sehingga menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dapat terus ditingkatkan ke depannya.

2. Analisis *Growth*

Analisis *growth* digunakan untuk melihat perkembangan PAD dari tahun ke tahun. Nilai pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Sebaliknya, nilai pertumbuhan yang negatif mengindikasikan penurunan penerimaan PAD, yang dapat menggambarkan adanya hambatan dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun perubahan kondisi ekonomi daerah.

Berdasarkan analisis *growth* yang dilakukan oleh (Biehl et al., 2024), kinerja keuangan pemerintah daerah memperlihatkan pola perkembangan yang dinamis dan sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan keuangan serta keberlanjutan kebijakan fiskal yang diterapkan. Laju pertumbuhan pendapatan daerah merefleksikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola sumber penerimaan secara optimal, sekaligus menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perubahan kondisi ekonomi dan kerangka regulasi. Temuan tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan pertumbuhan keuangan tidak semata-mata bergantung pada besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga ditentukan oleh kualitas tata kelola, tingkat transparansi, dan efektivitas proses pengambilan keputusan, sehingga analisis pertumbuhan dapat dijadikan acuan pembandingan dalam mengevaluasi capaian serta arah kinerja keuangan daerah pada penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 12. Hasil Perhitungan Analisis *Growth* Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai <i>Growth</i> (%)
2020	5,60
2021	34,97
2022	-22,03
2023	0,81
2024	15,09
Rata-rata	6,89

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Wonosobo selama periode 2020–2024 adalah sebesar 6,89%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu 34,97%. Sedangkan penurunan terdalam terjadi pada tahun 2022 dengan nilai -22,03%. Pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD belum stabil dari tahun ke tahun.

Menurut keterangan BPPKAD Kabupaten Wonosobo, ketidakstabilan pertumbuhan PAD pada periode penelitian terutama dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, yang memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi fiskal daerah. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi berlangsung secara bertahap dan tidak merata, sehingga penerimaan PAD belum dapat kembali stabil dalam waktu singkat. Namun demikian, pada tahun 2024 mulai terlihat perbaikan pertumbuhan PAD, yang mencerminkan pulihnya aktivitas ekonomi daerah serta adanya upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan oleh pemerintah daerah.

3. Klasifikasi Kuadran

Klasifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai *share* dan *growth* masing-masing tahun terhadap nilai rata-rata lima tahun terakhir. Hasil perbandingan tersebut kemudian

dipetakan ke dalam empat kuadran untuk melihat posisi dan kondisi kemandirian keuangan daerah. Melalui klasifikasi ini, dapat dinilai apakah kemampuan keuangan daerah tergolong ideal atau masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi kontribusi PAD terhadap belanja daerah maupun dari sisi pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun.

Berdasarkan analisis klasifikasi kuadran *share* dan *growth* dalam penelitian (Aminuddin & Winarningsih, 2024), kinerja keuangan daerah berdasarkan klasifikasi kuadran menunjukkan bahwa sebagian besar daerah belum mandiri secara fiskal, karena kontribusi dan pertumbuhan PAD masih terbatas. Akibatnya, banyak daerah masih berada pada kuadran dengan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat, meskipun tetap memiliki potensi berkembang melalui penguatan basis pendapatan, perbaikan tata kelola keuangan, dan optimalisasi kebijakan otonomi daerah.

<i>Growth</i>	
<i>Share</i>	Kuadran II
	<i>Share</i> Rendah, <i>Growth</i> Tinggi
	2024
	Kuadran IV
	<i>Share</i> Rendah, <i>Growth</i> Rendah
	2022 dan 2023
	Kuadran I
	<i>Share</i> Tinggi, <i>Growth</i> Tinggi
	2021
	Kuadran III
	<i>Share</i> Tinggi, <i>Growth</i> Rendah
	2020

Sumber: BPPKAD Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Gambar 6. Klasifikasi Kuadran *Share* dan *Growth* Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa:

- a. Tahun 2020: Kuadran III (nilai *share* tinggi, nilai *growth* rendah) → mandiri tapi tidak potensial.
- b. Tahun 2021: Kuadran I (nilai *share* tinggi, nilai *growth* tinggi) → mandiri dan potensial (ideal).
- c. Tahun 2022 dan 2023: Kuadran IV (nilai *share* rendah, nilai *growth* rendah) → tidak mandiri dan tidak potensial.
- d. Tahun 2024: Kuadran II (nilai *share* rendah, nilai *growth* tinggi) → tidak mandiri tapi potensial.

Hasil klasifikasi menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo sempat berada pada posisi yang ideal di tahun 2021, ketika nilai *share* dan *growth* sama-sama berada pada kategori tinggi, sehingga masuk ke Kuadran I (mandiri dan potensial). Pada tahun-tahun berikutnya, posisi menurun hingga berada pada Kuadran IV, yang mencerminkan rendahnya kontribusi PAD terhadap belanja daerah sekaligus melemahnya pertumbuhan PAD. Baru pada tahun 2024 terlihat adanya perbaikan, di mana posisi bergeser ke Kuadran II, yang berarti pertumbuhan PAD kembali menunjukkan potensi meskipun tingkat kemandiriannya masih rendah.

Pergerakan posisi ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Kabupaten Wonosobo belum stabil dan sangat dipengaruhi oleh dinamika penerimaan PAD. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya penggalan dan optimalisasi potensi PAD secara lebih intensif dan berkelanjutan, baik melalui peningkatan basis pajak daerah dan retribusi daerah, penguatan sektor ekonomi lokal, maupun perbaikan tata kelola pemungutan pendapatan daerah.

4. Analisis *Elasticity*

Analisis *elasticity* digunakan untuk melihat tingkat responsivitas PAD terhadap perubahan PDRB. Nilai *elasticity* lebih dari 1 (>1) menunjukkan bahwa PAD bersifat elastis, artinya

kenaikan PDRB diikuti peningkatan PAD dalam proporsi yang lebih besar. Sebaliknya, nilai *elasticity* kurang dari 1 (<1) menunjukkan bahwa PAD bersifat inelastis, sehingga perubahan PDRB tidak berdampak signifikan terhadap peningkatan PAD. Sementara itu, nilai *elasticity* sama dengan 1 (=1) menandakan bahwa perubahan PDRB berbanding lurus dengan perubahan PAD atau berada dalam kondisi seimbang.

Berdasarkan hasil analisis *elasticity* pada penelitian (Rizky et al., 2023), PAD terbukti memiliki respons yang kuat terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah, sehingga perubahan pada PAD secara nyata diikuti oleh perubahan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya sendiri. Temuan ini menunjukkan bahwa PAD bersifat relatif elastis terhadap kemandirian keuangan, yang menegaskan peran strategis optimalisasi pajak dan retribusi daerah dalam mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat. Dengan demikian, hasil penelitian terdahulu ini memperkuat argumen bahwa penguatan basis PAD menjadi faktor kunci dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan keuangan daerah.

Tabel 13. Hasil Perhitungan Analisis *Elasticity* Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai <i>Elasticity</i> (%)
2020	-3,42
2021	9,50
2022	-4,39
2023	0,19
2024	3,30
Rata-rata	1,04

Sumber: LRA Kabupaten Wonosobo (Data yang diolah, 2025)

Pada tahun 2020, 2022, dan 2023, nilai elastisitas bernilai kurang dari 1, bahkan bernilai negatif pada tahun 2020 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi daerah belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap peningkatan PAD. Dengan kata lain, kenaikan atau penurunan PDRB tidak secara langsung diikuti oleh pergerakan PAD yang sebanding. Kondisi ini dapat mencerminkan bahwa penerimaan PAD masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti efektivitas pemungutan, struktur sumber pendapatan yang belum optimal, atau situasi ekonomi yang belum stabil.

Sementara pada tahun 2021 dan 2024, nilai elastisitas menunjukkan angka di atas 1, yang berarti pertumbuhan PDRB mampu memberikan dorongan yang kuat terhadap peningkatan PAD pada kedua tahun tersebut. Hal ini menandakan bahwa pada periode tersebut, sumber PAD cenderung lebih produktif dan responsif terhadap kondisi ekonomi daerah. Secara keseluruhan, nilai rata-rata elastisitas sebesar 1,04 menunjukkan bahwa secara umum PAD bersifat cukup elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, fluktuasi antar tahun menunjukkan bahwa hubungan ini belum konsisten, sehingga pemerintah daerah perlu terus mengupayakan penguatan basis penerimaan dan peningkatan efektivitas kebijakan pengelolaan PAD agar ketergantungan terhadap dinamika ekonomi dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Kendala yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024

Tantangan dalam mencapai kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Wonosobo masih cukup kompleks.

Permasalahan utama terletak pada rendahnya kontribusi PAD serta pengelolaan belanja daerah yang belum sepenuhnya efisien. Upaya peningkatan PAD melalui penerapan sistem *e-lapak* (elektronifikasi lapor pajak) *e-retribusi* seperti *e-tiketing* objek wisata dan *e-retribusi* pasar sebenarnya telah dilakukan untuk memperbaiki transparansi dan akurasi pemungutan. Namun, implementasinya masih terkendala oleh minimnya literasi digital, terutama di kalangan pedagang pasar yang belum terbiasa dengan sistem pembayaran berbasis elektronik. Selain itu, terdapat hambatan dari sisi ketersediaan sarana pendukung yang disediakan oleh pemerintah.

Potensi PAD yang ada belum tergarap secara optimal, sehingga penerimaan yang diperoleh belum mampu mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah. Di sisi pengeluaran, struktur belanja yang didominasi belanja operasi membatasi ruang fiskal untuk pembangunan dan investasi daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian fiskal memerlukan perbaikan menyeluruh, baik dalam hal perluasan basis pendapatan maupun peningkatan efisiensi pengeluaran.

Proses digitalisasi dan modernisasi tata kelola juga menghadapi hambatan karena memerlukan dukungan anggaran, fasilitas teknologi, pelatihan, dan sosialisasi yang memadai. Selain kendala teknis, tingkat literasi masyarakat terhadap layanan digital juga memengaruhi keberhasilan implementasinya.

Dampak dari rendahnya PAD terlihat pada terbatasnya kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan strategis, termasuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer membuat daerah rentan apabila terjadi pengurangan atau keterlambatan alokasi transfer dari pemerintah pusat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk Menghadapi Kendala

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penerapan tapping box, sistem *e-lapak* (elektronifikasi lapor pajak) dan sistem *e-retribusi* pada sektor pariwisata dan pasar guna meminimalisir kebocoran PAD. Fokus optimalisasi diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi penerimaan seperti pasar, rekreasi, dan pelayanan publik, dengan penekanan pada pengembangan sumber penerimaan yang telah ada karena keterbatasan potensi sumber baru.

Strategi penguatan pendapatan ditempuh melalui intensifikasi, yaitu optimalisasi penagihan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta ekstensifikasi dengan pendataan ulang objek pajak dan perluasan basis penerimaan. Di sisi belanja daerah, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi dengan menekan belanja yang tidak bersifat prioritas. Selain itu, digitalisasi pajak dan retribusi daerah terus didorong untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan. Upaya pendukung lainnya meliputi pemutakhiran data objek pajak, sosialisasi kepada masyarakat, serta pengembangan sektor wisata dan budaya melalui penyediaan infrastruktur dan promosi daerah.

Meskipun demikian, hasil pelaksanaan strategi tersebut belum memberikan peningkatan yang optimal. Hambatan struktural masih muncul, seperti tingginya porsi belanja operasi yang membatasi ruang fiskal untuk pengembangan PAD. Selain itu, ketersediaan sarana digital pendukung masih terbatas, sehingga menghambat implementasi penuh sistem digital. Pemerintah daerah juga masih perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Upaya lanjutan tetap dilakukan melalui studi tiru ke daerah lain dan penyederhanaan proses perizinan untuk mendorong masuknya investasi baru.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Wonosobo selama periode 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah berada pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum mandiri secara fiskal dan masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong tinggi, kontribusi PAD terhadap total pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil, sehingga belum mampu memperkuat kapasitas fiskal secara signifikan. Analisis *share*, *growth*, dan *elasticity* menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah bersifat fluktuatif dan belum stabil, di mana hanya pada tahun tertentu daerah berada pada kondisi mandiri dan potensial, sementara pada sebagian besar periode penelitian masih berada pada posisi tidak mandiri.

Kondisi rendahnya kemandirian fiskal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain terbatasnya optimalisasi potensi PAD, struktur belanja daerah yang didominasi oleh belanja operasi, serta kendala dalam implementasi digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, modernisasi administrasi, serta penguatan sektor-sektor potensial seperti pariwisata dan pelayanan publik. Namun, upaya tersebut belum mampu mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi yang lebih terintegrasi untuk memperluas basis ekonomi produktif, meningkatkan efisiensi belanja, dan memperkuat tata kelola fiskal daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, periode pengamatan terbatas pada tahun 2020-2024, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan jangka panjang kemandirian keuangan daerah. Kedua, analisis lebih difokuskan pada pendekatan rasio keuangan dan belum mengkaji secara mendalam faktor kelembagaan, politik, dan sosial yang dapat memengaruhi kinerja fiskal daerah. Ketiga, penggunaan data sekunder dari Laporan Realisasi Anggaran berpotensi belum menangkap secara utuh efektivitas kebijakan fiskal di tingkat implementasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas periode analisis, mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif yang lebih mendalam, serta memasukkan variabel non-keuangan guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah.

REFERENSI

- Abdullah, J., & Hasan, W. (2022). Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(2), 208.
<https://doi.org/10.32662/gaj.v5i2.2414>
- Amaliyah, A. R. (2020). Analisis Laju Pertumbuhan Dan Efektifitas Penerimaan Retrisubi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 4(2), 96.
<https://doi.org/10.25273/inventory.v4i2.7667>
- Aminuddin, N., & Winarningsih, S. (2024). Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal of Economics and Business UBS*, 13(1).
- Azwar, A. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Potensi Pertumbuhan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2017-2021. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 7(1), 1–25.
<https://doi.org/10.31092/jmkp.v7i1.2118>
- Biehl, H., Bleibtreu, C., & Stefani, U. (2024). The Real Effects of Financial Reporting: Evidence and Suggestions for Future Research. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 54(December 2023), 100594.
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2023.100594>
- Fadhilla, R. N., Nissa, D. N. F., & Putri, M. A. (2025). Menakar Kemandirian Keuangan Daerah: Studi Kasus Ketergantungan Fiskal Kabupaten Magelang 2020 – 2024. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 10(2), 129–143.
- Faradilla, S. P., & Hanifa, N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, Efisiensi PAD dan Kemandirian Kota Surabaya. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 4(3), 98–104.
- Harto, T., & Junawan. (2025). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 17(1).
- Hasanah, N., Masdar, R., Furqan, A. C., & Tenripada. (2025). Empirical Evidence on the Role of Local Own-Source Revenue in Strengthening Fiscal Independence of Indonesian Local Governments. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(4), 2950–2962.
- Naning Setiani, & Aris Eddy Sarwono. (2025). Analisis Rasio Keuangan Apbd Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2024. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 233–246.
<https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.957>

- Natsir, M. K. K. (2025). Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(1), 141–162. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718>
- Pardede, L. P. N. (2024). Analisis Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mengukur Kinerja Keuangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 467–473.
- Patonah, I. S., Nilasari, Y., & Pertiwi, T. P. (2023). Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *ASWAJA*, 4(2), 10–18.
- Rahayu, W., Diyar, A. S., & Priyatmo, T. (2024). Pengaruh Pajak Daerah, DBH, dan DAK terhadap Kemandirian Keuangan Pemda di Provinsi Riau. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.33105/jmp.v5i1.513>
- Rasid, K., & Waluyo, D. E. (2012). Elastisitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb) Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(1), 62. <https://doi.org/10.22219/jep.v10i1.3717>
- Rizky, S., Akhyar, C., Ristati, & Husaini. (2023). The Influence of Local Own Source Revenue (PAD) on The Financial Independence of Regencies Cities Throughout Sumatra Island. *Journal of Management Research, Utility Finance and Digital Assets*, 353–358.
- Saragih, R., & Nurlinda. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. *Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 6(2), 1–11.
- Suryahadi, M. Y., & Santosa, A. B. (2024). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2018-2022. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(5), 1060–1071. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11672>
- Syarifudin, A., & Ramadhani, R. (2023). Regional Financial Management and Independence Projection With the Issuance of The HKPD Law. *Jurnal Ekonomi SEAN Institute*, 12(01).
- Waruwu, M., Pu'at, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(1), 917–932. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>